

## PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DALAM PRESPEKTIF RASIO KETERGANTUNGAN DAERAH DAN RASIO KEMANDIRIAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Nadya Irhandi Putri<sup>1</sup>

[Nadyairhandiputri18@yahoo.com](mailto:Nadyairhandiputri18@yahoo.com)

Mumu M.Fadjar<sup>2</sup>

[mmfadjar68@gmail.com](mailto:mmfadjar68@gmail.com)

Idang Norodin<sup>3</sup>

[idang1261@gmail.com](mailto:idang1261@gmail.com)

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

### ABSTRAK

Laporan Realisasi Anggaran salah satu laporan keuangan digunakan untuk menyampaikan perbandingan informasi terkait pencapaian keuangan. Salah satu cara untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah yaitu dengan mengukur kinerja keuangan menggunakan taksiran secara nyata dan konkrit yang dihitung melalui rasio kinerja keuangan. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah Rasio Ketergantungan Daerah dan Rasio Kemandirian Daerah. Dana Perimbangan diberikan kepada pemerintah daerah sebagai pelaksanaan kegiatan desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun anggaran 2016-2019 dengan dua perspektif yakni perspektif Rasio Ketergantungan Daerah dan perspektif Rasio Kemandirian Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Bulanan tahun 2016-2019. Teknik analisis yang digunakan melakukan uji dengan bantuan IBM SPSS 26 for Windows. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dalam perspektif rasio ketergantungan daerah dan rasio kemandirian daerah.

Kata Kunci: Dana Perimbangan, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah.

### ABSTRACT

*Budget Realization Report one of the financial statements is used to convey information gap related to financial achievements. One way to assess the financial condition of local governments is to measure financial performance using concrete and concrete estimates calculated through financial performance ratios. In this study the ratio used is the Regional Dependency Ratio and the Regional Independence Ratio. The Balancing Fund is given to local governments as the implementation of decentralization activities. This study aims to examine the effect of balance funds on the financial performance of Sukabumi District Government in the 2016-2019 fiscal year with two perspectives namely the Regional Dependency Ratio perspective and the Regional Independence Ratio perspective. This research uses a quantitative method with an associative approach. The population and sample in this study is the 2016-2019 Monthly Budget Realization Report. The analysis technique used is to test with the help of IBM SPSS 26 for Windows. With the results of the study stated that the balancing fund affects the financial performance in the perspective of regional dependency ratios and regional independence ratios.*

*Key words: Balance Fund, Regional Dependency Ratio, Regional Independence Ratio.*

## 1. PENDAHULUAN

Kabupaten Sukabumi secara administrasi memiliki empat puluh tujuh kecamatan, lima kelurahan, dan tiga ratus delapan puluh satu desa. Kecamatan Pelabuhan ratu pada saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Sukabumi (BPS Kab.Sukabumi:2020)

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah suatu hak, kewajiban, dan wewenang daerah dalam hal mengatur seluruh kegiatan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan pemerintahan yang melaksanakan pengoptimalan suatu kinerja, akuntabilitas, dan transparan.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjabarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan desentralisasi melakukan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diwujudkan dalam kegiatan berupa rencana kerja

pemerintah daerah. Baik secara langsung atau tidak langsung APBD menggambarkan kemampuan dari suatu pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menetapkan tentang pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah. Didalamnya menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya dilakukan secara tertib, sesuai dengan peraturan undang-undang, transparan, dan bertanggung jawab. Atas dasar pengelolaan keuangan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu kriteria utama dalam mendeteksi kemampuan suatu pemerintah daerah dalam bidang keuangan. Dari penilaian kinerja keuangan tersebut tidak sedikit pemerintah daerah harus meningkatkan kinerjanya.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) di sukabumi menemukan kasus pengelolaan keuangan kurang baik di pemerintah daerah Kabupaten sukabumi dan menggambarkan kinerja keuangan yang tercoreng. Tahun anggaran 2017 ditemukan kesalahan berulang pengelolaan keuangan terletak pada belum profesional dalam mengelola dan kurangnya publikasi laporan kinerja kepada masyarakat. (sukabumiupdate.com)

Berdasarkan penjabaran dan fenomena yang di temukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan dalam dua prespektif yang digunakan yakni prespektif rasio ketergantungan daerah dan prspektif rasio kemandirian daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kemudan dialokasikan kepada daerah untuk pelaksanaan kegiatan desentralisasi bersarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Klasifikasi Dana Perimbangan sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil

Menurut UU No 33 Tahun 2004 , Anggaran dari pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah, pemberian anggaran berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Sumber penerimaan Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak berasal dari PBB, BPHTB, serta PPh QPOPDN dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan dan minyak bumi.

b. Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 dana alokasi umum adalah dana untuk daerah dialokasikan dalam APBN pembagian berdasarkan persentase dari pendapatan neto dalam negeri disesuaikan dengan kriteria tertentu yang melihat aspek keadilan dan pemerataan yang sejalan terhadap pembangunan dan perhitungan umumnya sesuai dengan Undang-undang. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.

c. Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokai Khusus (DAK) adalah salah satu dana perimbangan yang berasal dari APBN dialokasikan kepada daerah dalam rangka pendanaan untuk kegiatan tertentu dengan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK.

### 2.2 Kinerja Keuangan

Menurut Mahsun (2013:25) kinerja keuangan merupakan gambaran pengelolaan di bidang keuangan untuk melihat suatu pencapaian dar program dalam perwujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Pada penelitian ini kinerja keuangan diukur menggunakan tiga rasio keuangan pemerintah daerah yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian daerah. Berikut dibawah ini rasio pengukuran kinerja keuangan menurut Mahmudi (2016:169):

a. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan cara membagi total pendapatan transfer dengan total penerimaan daerah. Semakin besar presentase ketergantungan maka dinyatakan pemerintah daerah tersebut telalu bergantung kepada pemerintah pusat.

b. Rasio Kemandirian Daerah

Dihitung dengan cara membagi jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, menurut Sugiyono (2017:115) penelitian yang penggunaan data berdasarkan angka dan statistik. Sumber pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Sugiyono (2017:137) data sekunder bersumber dari data yang tidak langsung diberikan kepada pengolah data.

#### 3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan 48 sampel yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Bulanan tahun 2016-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling, menurut Sugiyono (2017:141) sampel menggunakan data keseluruhan pada populasi dan tidak ada pengecualian.

#### 3.3 Metode Analisis

Metode penyusunan secara sistematis data yang telah ditemukan dilapangan baik secara studi kepustakaan maupun dokumentasi. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dana perimbangan terhadap kineja keuangan peneliti menggunakan IBM SPSS Statistic 26. Dengan analisis uji asumsi klasik; uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier sederhana, uji hipotesis; uji t dan koefisien determinasi.

### 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.3 Hasil Penelitian

##### 4.3.1 Uji Parsial Prespektif Rasio Ketegantungan Daerah

Sugiyono (2017:151) pengujian parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen secara individual. Dengan ketentuan nilai signifikan dibawah nilai 5% atau 0,05

**Tabel 4.1 Uji t Prespektif Rasio Ketegantungan Daerah**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.846	2.871		2.399	.000
	Dana Perimbangan (X1)	.415	.000	.441	4.361	.003

a. Dependent Variable: Rasio Ketegantungan Daerah (Y)

Berdasarkan tabel di atas uji t variabel independen Dana Perimbangan nilai signifikan sebesar  $0,003 < 0,05$  dengan taraf kepercayaan sebesar 95%. Dan  $t_{tabel}$  sebesar  $2,012 < t_{hitung}$  sebesar  $4,361$ . Dimpulkan secara pasial Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan dalam prespektif rasio ketergantungan daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

#### 4.3.2 Uji Parsial Prespektif Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 4.2 Uji t Prespektif Rasio Kemandirian Daerah

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients				
		B	Std. Error			
1	(Constant)	1.632	2.569		2.169	.000
	Dana Perimbangan (X1)	.311	.000	.336	3.492	.006

a. Dependent Variable: Rasio Kemandirian Daerah (Y)

Berdasarkan tabel di atas uji t variabel independen Dana Perimbangan nilai signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  dengan taraf kepercayaan sebesar 95%. Dan  $t_{tabel}$  sebesar  $2,012 < t_{hitung}$  sebesar  $3,492$ . Dimpulkan secara pasial Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan dalam prespektif rasio kemandirian di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

## 4.4 Pembahasan

### 4.4.1 Pengaruh Dana Perimbangan Prespektif Rasio Ketergantungan Daerah

Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan dengan prespektif rasio ketergantungan daerah menunjukan berpengaruh signifikan. Mursyidi (2013:32) pengukuran kinerja keuangan akan menunjukan tingkat yang menyatakan besaran ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Menurut Halim (2012:131) kinerja keuangan pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan cukup tinggi akan berdampak pada kegiatan operasional pemerintah daerah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa alokasi dana perimbangan dipergunakan untuk pemerataan keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan desentralisasi. Hal tersebut menandakan pemerintah daerah sesuai memiliki perbedaan kemampuan yang berdasarkan kondisi dan wilayah tatanan administrasi pemerintah daerah.

Menurut Faud (2016:45) penggunaan dana yang dialokasikan pemerintah secara berlebih akan menimbulkan angka ketergantungan daerah. Hasil uji parsial menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi penggunaan dana perimbangan mempengaruhi penilaian kinerja keuangan dalam prespektif rasio ketergantungan daerah. Penelitian ini sejalan dengan Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, penggunaan dana perimbangan akan berdampak pada tingkat ketergantungan daerah.

### 4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan Prespektif Rasio Kemandirian Daerah

Hasil penelitian menunjukan pengaruh signifikan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan dalam prespektif rasio kemandirian daerah. Menurut Halim (2016:149) kemandirian daerah ditandai dengan seberapa besar kondisi keuangan pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya. Widjaya (2009:16) sebagai daerah otonom pemerintah pusat mengalokasikan dana berupa dana perimbangan guna membantu pemerataan daerah dan kemandirian daerah yang di ciptakan oleh suatu daerah. Penggunaan dana perimbangan yang tidak berlebih akan menjaga stabilitas daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suseno (2018) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.3 Kesimpulan

1. Penggunaan Dana perimbangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berpengaruh signifikan dengan nilai 0,003 terhadap kinerja keuangan dengan prespektif rasio ketergantungan daerah
2. Penggunaan Dana perimbangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berpengaruh signifikan dengan nilai 0,006 terhadap kinerja keuangan dengan prespektif rasio kemandirian daerah

### 5.4 Saran

1. Diharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan publikasi laporan kinerja kepada masyarakat.
2. Kepada peneliti selanjutnya penulis memberikan saran untuk menambah variabel penelitian dan meningkatkan kedalaman penelitian sehingga dihasilkan penelitian yang lebih luas.

### DAFTAR PUSTAKA

<https://sukabumikab.bps.go.id> [17 April 2020]

Update.S., (2018, Desember 17) *Fitra Soroti Lima Ksalahan Berulang Pengelolaan Keuangan Pemkab Sukabumi*. Sukabumi Update [Online]. Tersedia:

<https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/pemerintah/49437-Fitra-Soroti-Lima-Kesalahan-Berulang-Pengelolaan-Kuangan-Pemkab-Sukabumi> [25Februari2020]

Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik—Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Mahsun. M. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFE: Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Tentang Dana Perimbangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Jakarta.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA

Suseno, Agysta Ajeng. 2018 “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016)*” Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pasundan.

Pratiwi, Yuni Tri. 2018. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016*”. Skripsi.Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.

Faud M.Ramli. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Halim, Abdul, dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Widjaya, HAW.2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers